

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja aparatur pemerintah diukur dari kemampuannya menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi dari birokrasi pemerintah salah satunya ialah fungsi pengaturan (Mustopadidjaja 2002:75). Fungsi pemerintah tersebut tetap harus diselenggarakan seefektif mungkin, hanya saja karena banyak fungsi-fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, diperlukan kriteria yang berbeda untuk menilai kinerja birokrasi sebagai suatu kesatuan utuh. Dengan kata lain, birokrasi kedepannya semakin dituntut untuk menyelenggarakan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan administratif dengan kinerja yang baik.

Membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan kinerja birokrasi yang mampu untuk menyelesaikan pekerjaan, yang didukung dengan kemampuan aparatur birokrasi pemerintah itu sendiri sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Kinerja aparatur yang baik tentu bisa dijadikan salah satu faktor dasar atau tolak ukur keberhasilan di tingkat pemerintahan, dalam hal ini kinerja pegawai mengambil peran yang sangat penting dalam upaya untuk melaksanakan tugasnya dengan

sebaik-baiknya. Kinerja aparatur dirasakan semakin besar perannya dalam mewujudkan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur publik, hal ini dikarenakan seorang pegawai adalah faktor penentu dalam keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan yang sekaligus merupakan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah, sehingga perubahan kinerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan (Diklat) serta pengalaman kerja (Wirawan 2009:05).

Mengevaluasi kinerja pegawai secara objektif dan akurat, merupakan tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Kinerja seorang lulusan suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya tentu tidak sama, hal ini tergantung kepada tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing lulusan setelah mereka menerima, memahami materi pelajaran dan menerapkan serta mengembangkan dilingkungan kerja sesuai dengan kesempatan/kreativitasnya. Dalam perkembangannya kinerja birokrasi pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah melakukan inovasi dalam pelayanan untuk masyarakat, salah satunya dengan menerapkan *e-government* yaitu penggunaan atau penerapan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah.

Perkembangan implementasi *e-government* dikalangan pemerintahan menjadi sebuah keharusan diseluruh penyelenggaraan pemerintahan. Keseluruhan jenis aplikasi yang dipergunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah ataupun pemangku

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Inisiatif *E-government* di Indonesia telah dikenalkan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government*. Lebih jauh lagi, *E-government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimpulkan hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang sudah menerapkan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat Kabupaten hingga Desa, menjadi bukti jika teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan di Indonesia dan menjadi sarana terpenting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam aplikasi *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan dilingkungan pemerintah daerah, masalah yang dihadapi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah dan masyarakat. Dari sisi pemerintah kendala yang dapat diidentifikasi adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran operasional. Sedangkan kendala dari sisi masyarakat adalah pola pikir masyarakat tentang teknologi informasi

Kabupaten Subang menerapkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 44 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati No. 40 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Sehingga menarik untuk diteliti karena dianggap

berhubungan dengan ranah ilmu pemerintahan yang sedang peneliti tempuh yaitu program studi Ilmu Pemerintah. Adapun prestasi Kabupaten Subang diantaranya yaitu berhasil meraih predikat dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) dari Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Subang Tahun 2016.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang merupakan prosedur untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati No. 44 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati No. 40 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah merupakan sebuah Aplikasi yang berbentuk Web yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah khususnya pada Bagian Akuntansi Kabupaten Subang. Untuk menjalankan Aplikasi ini dibutuhkan dukungan kinerja aparatur yang baik yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi khususnya mengoperasikan komputer untuk mendukung kinerja yang lebih baik,efisien dan mempermudah kinerja. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan ini hanya digunakan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dan bagian Akuntansi di setiap Kecamatan Kabupaten Subang.

Prosedur dalam sistem sistem informasi akuntansi pemerintah ini, mengatur teknis penyusunan dan penyajian laporan keuangan sejak analisis transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan baik secara manual ataupun terkomputerisasi. Sistem Akuntansi juga menjelaskan transaksi laporan dari kecamatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas contohnya laporan keuangan bulanan dari kecamatan, yang di dalamnya terdapat gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras, iuran asuransi kesehatan dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan tampilan web sistem informasi akuntansi pemerintah yang digunakan Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Subang.

Gambar 1.1

Tampilan Web Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan



(Sumber : Modul Sistem informasi Akuntansi Pemerintah 2019)

Gambar diatas merupakan Tampilan Web Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan yang dibuka oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan Subang.

Permasalahan kinerja aparatur menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu sering terjadi kesalahan pada saat menginput data (*human*

error) dan sering terjadi keterlambatan penginputan data. Sehingga harus ada Aparatur yang mengecek kembali inputan data yang di input pada Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah diantaranya : Triyani (2018), memaparkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi and sistem pengendalian internal mempengaruhi laporan keuangan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Metro, karena sistem informasi akuntansi ini sangat membantu sekali terhadap aparatur dalam membuat laporan keuangan yang baik yang sudah di tunjangan dengan sistem teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Metro, kemudian objek penelitiannya yakni pegawai yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dihasilkan. Responden dalam penelitian ini yakni berjumlah 90 orang. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS).

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam fokus penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mengenai Kinerja Aparatur Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, karena menyangkut pembahasan yang sama dan yang membedakan hanyalah indikator teori yang digunakan sehingga penelitian diatas

dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2017), memaparkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga apakah sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner yang disebarkan kepada responden. Kuisisioner dibagikan kepada 69 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA).

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam lokus penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mengenai Kinerja Aparatur Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, karena menyangkut pembahasan yang sama dan yang membedakan hanyalah indikator teori yang digunakan sehingga penelitian diatas dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas maka peneliti membuat sebuah penelitian yang berjudul “Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan peneliti di atas, maka untuk mempermudah arah proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:“bagaimana kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, dilihat dari indikator produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja aparatur dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, sedangkan tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produktifitas kinerja aparatur dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui kualitas layanan aparatur pada Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui responsivitas aparatur dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.
4. Untuk mengetahui responsibilitas aparatur dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.
5. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja aparatur di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sekurang-kurangnya bagi:

1. Guna Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang Kinerja Aparatur menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah.

2. Guna Praktis

Penelitian ini juga semoga bermanfaat bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, agar kinerja Aparatur dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi kedepannya menjadi lebih baik.